

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era saat ini di mana taktik diplomasi untuk mendapatkan sebuah kepentingan sudah mulai menggunakan cara modern, tidak lagi menggunakan cara tradisional, yang sekarang tidak lagi menggunakan perang untuk tujuan perpolitikan global dan hubungan internasional melainkan menggunakan isu HAM, budaya, ekonomi, dan lingkungan lebih efisien dibandingkan dengan isu keamanan dan politik. Sehingga taktik diplomasi modern banyak merubah tatanan kerjasama di perpolitikan global dan hubungan internasional.

Hubungan internasional sendiri merupakan suatu sistem hubungan antar negara dalam ikatan internasional dan menjadikan diplomasi sebagai elemen penting dalam suatu negara yang menjadi faktor penentu eksistensi dan kerjasama dalam kancah internasional. Dari diplomasi dikenal sebagai suatu proses menjaga kebijakan politik luar negeri maupun dalam negeri itu sendiri¹. Diplomasi masa kini tidak hanya menyangkut soal politik saja, tapi bisa juga dijadikan sebagai senjata *multi-dimensional* dalam situasi dan lingkungan antar bangsa².

Globalisasi membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berujung pada upaya agar dunia menjadi terintergasi antar satu dengan yang lainnya.

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2004, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM : Jakarta, Hal : 1

² *Ibid* Hal : 3

Kondisi sebagaimana dimaksud, yang diciptakan oleh globalisasi, menuntut adanya peningkatan hubungan luar negeri yang signifikan dan tidak terbatas. Artinya hubungan kerjasama ekonomi internasional tidak harus selalu berupa hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar kota/propinsi. Mengingat kenyataan bahwa kota-kota di setiap negara memiliki peran yang penting dan cukup signifikan dalam kedudukannya sebagai sumber ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja potensial yang sangat mendukung jalannya proses globalisasi tersebut³.

Akibat dari globalisasi sendiri banyak memunculkan tokoh baru dalam kancah internasional seperti pemerintah lokal (*local government*). Dibuktikan dengan banyaknya kerjasama dan perjanjian-perjanjian internasional antar tokoh pemerintah lokal atau daerah antar negara di mana satu sama lain menjalin kerjasama dalam kanca internasional. Dari situlah muncul *sister city* di berbagai belahan dunia seperti di Indonesia.

Sulit untuk dibantah bahwa kota dan propinsi (dalam kerangka negara kesatuan) atau negara bagian (dalam kerangka negara federal) juga dapat dan perlu memiliki andil dalam hubungan ekonomi internasional yang eksis. Sebagai contoh antara lain dapat dikemukakan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Kota Medan dengan Kota Cengdu (Cina) yang penandatanganannya dilakukan pada tanggal 17 Desember 2002; kerjasama promosi

³ Jemmy Rumengan, "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Internasional, Vol 6, No.2, 2009, Hal 239

pengembangan bisnis dan investasi antara Kota Bogor dengan St. Louis County (Amerika Serikat) yang disepakati pada tahun 2004; kerjasama ekonomi antara DKI Jakarta dengan Pyongyang (Korea Utara) yang disepakati pada akhir tahun 2005, dan tentu saja masih ada lagi daftar panjang kerjasama ekonomi internasional antar kota atau antar propinsi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia⁴.

Seperti yang di kemukakan oleh Jemmy, dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri yang lebih terarah, terpadu, dan berlandaskan hukum yang lebih kuat, pemerintah Indonesia telah memberlakukan dua perangkat hukum yang terkait Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang "Hubungan-Luar Negeri" dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang "Perjanjian Internasional". Kedua, perangkat hukum dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri⁵.

Dengan adanya undang undang yang menjadi acuan pemerintah daerah melakukan kerjasama-kerjasama luar negeri dengan pemerintah dari negara lain, salah satunya kerjasama *sister city* ini yang banyak memunculkan tokoh pemerintah lokal yang mulai menunjukkan diri untuk menjalin kerjasama dan perjanjian-perjanjian internasional dalam kanca internasional. Salah satunya adalah kota

⁷⁴ Jemmy Rumengan, *Ibid*, hal.239

⁵ Stiglitz Joseph, 2003, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, PT Ina Publikatama, Jakarta, hal 12

Batam, Indonesia yang menjalin kerjasama internasional *sister city* dengan kota Gimje. Korea selatan dalam menyangkut kerjasama administrasi pembangunan pedesaan di bidang agrikultur. Yang mana kerjasama ini direncanakan oleh kedua belah pihak pada 5 April tahun 2011 lalu sebagai bukti keseriusan perwakilan dari kota Gimje mendatangi kantor walikota Batam Ahmad Dahlan⁶. Ada banyak tujuan dibalik dilakukannya konsep kerjasama *sister city* ini yang mana satu sama lain sangat mendukung dan berguna untuk kemajuan masing-masing kebutuhan dari apa yang memang kurang dari kedua belah pihak itu sendiri.

Kota Batam yang mana setelah ditetapkannya Pulau Batam menjadi sebuah kota administratif, Batam menjadi kawasan industri terkemuka dan menjadi “kota pencetak dollar”. Sehingga tak mengherankan jika total dari perekonomian Batam, 71,60% nya adalah merupakan kegiatan Industri Pengolahan. Untuk mendukung hal itu semua, Batam berusaha memperluas lahan untuk industrinya. Melalui digabungnya pulau-pulau sekitar seperti Pulau Batam, Tonton, Nipah, Setoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru dengan jembatan megah. Bahkan Batam sendiri membagi kawasannya menjadi beberapa bagian, yaitu kawasan Industri, kawasan wisata, kawasan penyedia air bersih, dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan⁷.

⁶ Tahap awal kedatangan perwakilan kota Gimje ke Kota Batam. <http://batam.tribunnews.com/2011/04/05/kota-batam-dan-gimje-korsel-bisa-saling-melengkapi> diakses pada tanggal 29 januari 2017.

⁷ Profil Kota Batam. <https://batam.go.id/profil-sejarah.html> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

Pada masa lalunya kota Batam pernah ada kerjasama *sister city* antar Batam dengan Shen Zen, padahal sudah mempunyai *basic* yang sama yaitu sama-sama kota industri. Akan tetapi kerjasama *sister city* ini gagal dikarenakan tidak saling mendukung dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Dari kerjasama Shen Zen dengan Batam lebih menguntungkan Shen Zen, pada tahun 2012 dengan berhasilnya Shen Zen mendapatkan penghasilan US\$114,5 miliar dan memiliki pendapatan per-kapita US\$ 13,200⁸. Sedangkan kota Batam yang saat itu mengalami inflasi besar-besaran. Shen Zen yang belajar dari Batam dan mereka berhasil, akan tetapi kota Batam ketinggalan jauh. itu berasal dari iklim investasi dari kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menyulitkan investor asing berupa kesulitan dalam birokrasi yang membuat banyaknya pengeluaran dana sehingga merugikan pihak investor yang membangun industrinya di kota Batam.

Penyebab internal tersebut tetap tidak menghalangi kota Batam dalam menjalin kerjasama *sister city* lagi. Dibuktikan dengan dilanjutkannya kedatangan perwakilan dari kota Gimje Seo Sung Heo yang mendatangi kota Batam dan menemui perwakilan dari pihak kota Batam pada bulan Agustus 2011 lalu menjadi tanda keseriusan Gimje dalam hal kerjasama *sister city* dengan kota Batam. Setelah pertemuan tersebut mereka menambah akan melakukan kerjasama dalam lima bidang, yaitu pariwisata,

⁸ Hasil dari kerjasama sebelumnya dengan Kota Shen Zen. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3164021/banyak-negara-belajar-dari-batam-dan-berhasil-tapi-batam-malah-ketinggalan> diakses pada tanggal 18 Februari 2017.

industri dan perdagangan, investasi, pendidikan dan pertanian⁹.

Sementara itu dari tim pendahulu *sister city* yang diketuai oleh KADIN kota Batam (Kamar Dagang dan Industri) Nada Faza Soraya, mengungkapkan bahwasanya kedua belah pihak memfokuskan kerjasamanya untuk meningkatkan agrikultur dan maritim. Masih ada banyak hal yang kemungkinan kerjasama *sister city* ini menjadi sebuah strategi dari masing-masing pihak untuk sebuah tujuan dalam pencapaian sebuah kepentingan-kepentingan dari pemerintah kedua belah pihak. Karena dari kedua belah pihak memiliki apa yang diinginkan dari satu sama lain. Bagaimana cara mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dari kerjasama *sister city* yang kota Batam dan kota Gimje terapkan dalam kerjasamanya. Keduanya berusaha mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau paling tidak membuatnya bisa saling sesuai atau keduanya berusaha membuat kepentingan-kepentingan yang unggul atas yang lainnya, serta upaya apa yang dilakukan Kota Batam agar kerjasama *sister city* yang baru dijalani dengan Kota Gimje agar lebih optimal dan tidak seperti pengalamannya dengan Kota Shen Zen yang memiliki *track record* yang tidak bagus dalam kerjasama *sister city* dibidang ekonomi, itu menjadi permasalahan dari penulisan ini. Karena pada kerjasama yang baru dengan Kota Gimje, Kota Batam juga mengambil kesepakatan untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi juga.

⁹ Tahap perencanaan kerjasama Kota Batam dengan Kota Gimje. <http://kepri.antaranews.com/berita/17979/gimje-bahas-sister-city-dengan-batam> diakses pd tgl 29.01.2017

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah di paparkan maka rumusan masalahnya:

“Bagaimana upaya kota Batam dalam meoptimalkan kerja sama *sister city* dengan kota Gimje?”

C. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan latar belakang dalam kasus kerjasama *sister city* tersebut lebih menunjukkan kepentingan daerah yang berujung dalam keuntungan dari negara yang mana menggunakan strategi atau kebijakan dalam kerjasama yang mana kota Batam terhadap kota Gimje menggunakan bidang lingkungan, ekonomi dan budaya dalam latar belakang kerjasamanya. Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab pokok permasalahan maka dalam kerangka teori ini penulis menggunakan teori atau pendekatan (*approach*) yang relevan yaitu konsep tentang Paradiplomasi yang berlanjut ke '*sister city*'.

1. *Paradiplomacy*

Paradiplomasi secara relatif merupakan fenomenal dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah '*paradiplomacy*' pada awalnya diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh seorang ilmuwan asal Basque, Panayotis Soltados tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy non-central governments*', menurut Aldecoa Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan

oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah *micro-diplomacy*.¹⁰ Yang mana dalam hubungan kerjasama yang '*non-centris*' ini, aktor-aktor dapat berupa INGO, *Foundation*, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional dan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara(pemda). Hubungan kerjasama yang kian lama berkembang berujung dengan kemunculan kerjasama '*sister city*' yang dulu '*sister province*'. Yang mana '*sister city*' ini adalah bagian dari paradiplomasi yang terkait pada isu kerjasama antara kota Batam dengan kota Gimje. Ada banyak tujuan dibalik dilakukannya konsep kerjasama *sister city* ini yang mana satu sama lain sangat mendukung dan berguna untuk kemajuan masing-masing kebutuhan dari apa yang memang kurang dari kedua belah pihak itu sendiri.

Penerapan konsep dan teori dalam kasus yang diangkat oleh penulis yaitu, dengan apa yang ada di latar belakang kerjasama *sister city* antara kota Batam dengan kota Gimje keduanya menyetujui untuk bekerjasama, dikarenakan saling membutuhkan satu sama lain dalam bidang yang dibutuhkannya, yaitu kota Batam yang butuh pelajaran dari Kota Gimje dalam bidang agrikultur, sedangkan kota Gimje membutuhkan pelajaran dari Kota Batam dalam bidang ekonomi. Seperti dengan halnya pemikiran milik Robert Keohane tentang saling bergantung yang mempertemukan kekurangan masing masing negara atau daerah melalui keunggulan komparatif masyarakat. Dengan dilengkapinya pemikiran tentang '*positive sum*' yaitu tentang hubungan antar bangsa

¹⁰ Alimukti, Takdir, 2013, *PARADIPLOMACY* kerjasama luar negeri oleh pemda daerah di Indonesia, Yogyakarta
hal 2

akan saling menguntungkan dengan terkaitnya hubungan kerjasamanya mengangkat isu-isu modern yaitu ekonomi, politik, HAM, lingkungan dan sebagainya, yang mana merambahnya kerjasama '*sister city*' antara kota Batam dengan kota Gimje. Dengan adanya kerjasama bilateral antara kota Batam dengan Kota Gimje yang mana diperankan langsung oleh tokoh '*sub-state*' tanpa ada campur tangan pemerintah pusat secara langsung. Merupakan bagian yang menaungi pembahasan topik dari tulisan yang ditulis penulis yaitu kerjasama '*sister city*'.

Kerja sama yang dijalani oleh pemda jika di tinjau dari segi ilmu hubungan internasional, secara teoritis merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat '*state centris*' yang mana pelaku dalam hubungan internasional datang dari non-pemerintah dapat secara leluasa melakukan kerjasama tanpa melibatkan pemerintah pusat. Hubungan kerjasama yang dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang disepakati.

Dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 1 pada tahun 1992 tentang kerjasama internasional, maka dari kedua belah pihak harus mensepakati dengan apa yang sudah tertera sebagai peraturannya dan harus saling menguntungkan. Demi memenuhi syarat kota Batam membenahi dari segi mempersingkat proses pemasukan barang, yang mana itu menjadi kendala yang bisa merugikan pihak *partner* dalam kerjasamanya.

2. *Sister City*

Sister city dalam pengertiannya bisa disebut juga sebagai kota kembar, dimana kerja sama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang¹¹. Dengan demikian *sister city* hanya dapat diterapkan oleh dua di antara pemerintah kota atau daerah di kedua belah pihak. Disamping itu kerjasama antar kota bersifat luas baik mencakup kerjasama ekonomi, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan dan kebudayaan yang kemudian disepakati secara resmi melalui penandatanganan di kedua belah pihak. Kerjasama akan terus berlanjut hingga memiliki *understanding*, manfaat yang positif dan niatan yang baik dalam bekerja sama demi mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing dalam penjelasan ini kerjasama yang dianut oleh kota Batam dengan kota Gimje guna pencapaian masing-masing negara.

Andi Oetomo menjelaskan awal mula *sister city* dimulai ketika negara-negara maju, seperti di Amerika dan Eropa saling bekerja sama, sehingga terjadi keseimbangan kondisi sosial ekonomi, namun seiring dengan globalisasi yang tak terbendung, arus informasi yang cepat serta diikuti dengan niat bekerja sama demi mencapai kepentingan sehingga muncul konsep *sister city*. Menurut Donal Bell Souder dan Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi kerja sama *Sister City* terbagi dalam :

- a. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *sister city*, hal ini berdasarkan pada tujuan

¹¹ Andi Oetomo, Apa Itu Sister City? http://Tataruang.atr-bpn.go.id/data_artikel

- peningkatan perdagangan antar kota, dan industri sehingga konteks kerjasama terjalin lebih dalam.
- b. Budaya, dalam konteks ini kerjasama budaya ditunjukkan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjadinya pemahaman mengenai latar belakang budaya, dan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar kota dalam hubungan internasional.
 - c. Pendidikan, dalam bidang ini biasanya melibatkan perwakilan atay delegasi dari suatu kota ke kota lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan dan mempelajari budaya lain untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
 - d. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditujukan untuk penyelesaian suatu kesamaan dalam masalah yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikannya masalah tersebut. Hal ini dapat ditujukan untuk perkembangan pmbanunan daerah yang lebih baik.

Sister City sering juga disebut *twin city* atau dalam bahasa indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Pengertian itulah yang digemari oleh koelompok kota-kota di Amerika serikat yang tergqabung dengan *Sister Cities International*(SCI) tang berpuast di Washington DC. Oleh karen itu *sister city* banyak digunakan di Amerika Serikat dan kota-kota aliansinya diberbagai dunia.¹² SCI didirikan oada 1956 aebagai bagian dari *The Netional League of Cities* yang kemudian memisahkan diri menjadi NGO atau korporasi non-profit pada 1967.

¹² Sister Cities International. <http://www.sistercities.org> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

Selain itu, dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjadi sebuah kerjasama *sister city* pemerintah daerah setempat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- b. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
- c. Merupakan urusan pemerintah daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
- d. Tidak mencampuri urusan politik dalam negeri.
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan.
- f. Kerjasama *sister city* tidak boleh dilaksanakan secara *insidental*

Dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota(*sister city*), dan Antar Provinsi(*Province*) dalam dan luar negeri.¹³

Dengan demikian kerjasama *sister city* ini bermula dengan tepat dan sesuai dari tahapan dan tata cara

¹³ surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota(*sister city*), dan Antar Provinsi(*Province*) dalam dan luar negeri

penyusunan resmi dari sebuah kerjasama *sister city*, yaitu¹⁴ :

- a. Perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan dijadikan fokus kerjasama. Termasuk dalam tahap ini adalah menentukan calon-calon potensial sebagai partner kerjasama.
- b. Tahap komunikasi dan penyusunan *draft Memorandum of Understanding* (MoU). Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam *draft* MoU yang disusun bersama.
- c. Mengajukan persetujuan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah local di luar negeri ke Kementerian Dalam Negeri termasuk materi dalam *draft* MoU beserta rencana detail kerjasama tersebut.
- d. Pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan DPRD.
- e. Tahap penandatanganan kerjasama *sister city* setelah mendapat persetujuan DPRD.

Mekanisme dari sebuah kerjasama *sister city* maka ajakan untuk mengadakan kerjasama ini yang berawal dari inisiatif dari Kota Gimje hingga berlanjut dengan penandatngnan MoU kerjasama *sister city* telah melalui prosedu diatas. Hal ini dibuktikan dengan terjalannya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan

¹⁴ Ali Mukti, Takdir, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinsi Press,2013) hlm. 193-194.

yang telah terjalin sejak 1973¹⁵. Lalu muncul keinginan dari pihak Pemerintah Kota Gimje yang ingin mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam untuk mengadakan hubungan dengan tawaran kerjasama dalam bidang teknologi agrikultur, pariwisata, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dilanjutkannya dari kesepakatan LoI ialah penandatanganan sebuah MoU, yang di adakan pada Agustus tahun 2013 lalu. Kedatangan dari perwakilan Kota Gimje bertepatan pada HUT RI ke-68. Walikota pada saat itu Ahmad Dahlan mengatakan, kedatangan mereka sekaligus menjadi tamu dalam perayaan HUT RI. Selain itu Pemko Batam dan rombongan perwakilan dari Kota Gimje melakukan MoU tentang industri pariwisata, tenaga kerja dan lain sebagainya. MoU yang dilakukan merupakan peningkatan dari tahap sebuah kerjasama yang bersatus dari LoI, menjadi MoU. Pada saat itu, akan diselaraskan dengan festival panen hasil pertanian Kota Batam.

Menurut Pemko Batam, MoU itu terkait dengan komitmen bersama dalam pembangunan Kota Batam dengan Kota Gimje sebagai *sister city*. Dimana dalam hubungan kerjasama ini sebagai kota kembar, dimaksudkan untuk pengembangan pariwisata, industri dan perdagangan investasi, pendidikan dan pertanian¹⁶. Selain itu kedua pemerintah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan, di karenakan pemerintah Kota Gimje Lee Gun Sik menyebutkan mereka butuh perawat. Dalam bidang pariwisata kedua Kota

¹⁵Data dari hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. <https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx> diakses pada 23 Januari 2019

¹⁶ Isi poin poin kesepakatan kerjasama sister city kota Batam dengan Kota Gimje. <https://www.haluankepri.com/news/detail/50223/hut-ri-di-batam-dihadiri-perwakilan-korsel-> diakses pada 23 Februari 2019

sepakat untuk melakukan pemasaran paket tur ditempat tujuan wisata di Kota Batam dan Kota Gimje. Dalam bidang pendidikan, kedua Kota sepakat untuk melaksanakan pertukaran pelajar dan pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam bidang investasi kedua kota sepakat melakukan program promosi bersama untuk meningkatkan investasi di kota Batam maupun di Kota Gimje. Dalam bidang pertanian kedua Kota dilakukannya pengembangan usaha rumput laut dengan mendirikan budi daya dan pabrik rumput laut, serta penanaman bibit ikan di Kota Batam dan Kota Gimje. Selanjutnya dalam bidang industri dan perdagangan kedua kota sepakat melakukan pertukaran informasi proses industri melalui pelatihan¹⁷.

Dalam poin ke d dalam mekanisme sebuah kerjasama *sister city* menjelaskan bahwa kedua belah pihak membuat keputusan dalam kerjasama mereka dan dari kesepakatan itu muncullah poin-poin penting dalam sebuah upaya dari masing-masing pihak. Dari semua persyaratan yang ada, Kota Batam dan Kota Gimje sudah memenuhi persyaratan, akan tetapi dari semua itu belum bisa menghasilkan kerjasama *sister city* yang efisien atau lebih optimal. Guna optimalnya kerjasama *sister city* Kota Batam dibutuhkan beberapa poin, yaitu:

- a) Persamaan kedudukan, yaitu kedua belah pihak tidak memiliki ketidak seimbangan dari segi power, akan tetapi kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama, yaitu saling membutuhkan dan tidak mendominasi satu sama lainnya.
- b) Memberikan manfaat dan saling menguntungkan, dari poin ini menjadi hal yang penting dari

¹⁷ Poin dan kelanjutan dari kesepakatan kerjasamanya.
<https://kepri.antaranews.com/berita/25973/kota-batam-gimje-sepakati-kerja-sama> diakses pada 22 Februari 2019

kerjasama ini, guna tidak merugikan mitra kerjasamanya Kota Batam melakukan beberapa evaluasi.

- c) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, sudah dasar dari sebuah kerjasama *sister city*, yang mana tidak boleh mencampuri urusan politik dari mitra kerjasamanya. Guna tidak memberi kesan buruk untuk hubungan diplomatik dari kedua belah pihak.
- d) Menghormati kedaulatan negara masing-masing, tidak menyinggung atau melakukan tindak yang melecehkan kedaulatan dari mitra kerjasama.
- e) Sesuai dengan peraturan undang-undang, melakukan program-program dan upayanya yang sesuai dengan undang-undang dalam negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang "Hubungan-Luar Negeri" dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang "Perjanjian Internasional". Kedua, perangkat hukum dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri.

D. Hipotesa

Dari latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang tertulis. Maka dapat diambil hipotesa upaya kota Batam dalam kerjasama *sister city* dengan kota Gimje adalah:

Memperbaiki tatanan birokrasi yang akomodatif dan memberikan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kerjasama *Sister City* antara Kota Batam dengan Gimje.

E. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari peneliti dalam mengulas kajian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana proses dari kerjasama *sister city* yang diterapkan oleh kota Batam terhadap kota Gimje secara jelas.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang diterapkan oleh kota Batam dalam kerjasamanya.

F. Metodologi Penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar dan situs-situs dari internet atau pun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang teliti tergantung pada valliditas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu :

- a. Dokumen/arsip;
- b. Buku-buku;
- c. Majalah dan surat kabar;
- d. Artikel-artikel dan data dari internet(*website*);

G. Sistematika Penulisan.

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis menuliskan sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan di atas.

Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang pengenalan profil dari kota Batam, Kota Gimje dan menjelaskan tentang kerjasama *sister city*.

Bab ketiga berisikan tentang faktor apa saja yang mendorong kerjasama, dan menyebutkan tentang keuntungan dari kerjasama tersebut.

Bab keempat upaya yang digunakan dalam mengoptimalkan tujuan pencapaian dari kerjasam *sister city* Kota Batam dengan Gimje

Bab kelima kesimpulan secara keseluruhan dari bab I hingga bab IV.